



**IMPLEMENTASI INSTRUKSI WALI KOTA NOMOR 01 TAHUN
2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN LOKASI
PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KECAMATAN
SUKARAMI KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS KELURAHAN TALANG BETUTU)
DISUSUN OLEH :**

NAMA : ISWA ZAKIRIN
NIM : 20.11.211
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Iswa Zakirin, 2024 Implementation of Mayor's Instruction Number 01 of 2017 Concerning Guidance and Mentoring of Climate Village Program Locations in Sukarami District, Palembang City (Case Study of Talang Betutu Village) Department of State Administration, Satya Negara College of Administrative Sciences (STIA) Palembang. Main Supervisor (I) Mr. M. Sattarudin, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mrs. Hj. Helda Fitriani, SPd., M.Si

Based on the results of observations regarding the Implementation of Mayor's Instruction Number 01 of 2017 Concerning Guidance and Mentoring of Climate Village Program Locations in Sukarami District, Palembang City (Case Study of Talang Betutu Village) there are indications of low community participation in Talang Betutu Village in the implementation of the Climate Village Program. This study aims to determine and analyze the Mayor's Instruction Number 01 of 2017 concerning Guidance and Mentoring of Climate Village Program Locations in Sukarami District, Palembang City.

The research method used by the author is a qualitative method, meaning that a study aims to provide a more detailed and clear picture and object. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. This study uses the theory of Van Metter and Van Horn. Based on the results of this research and analysis of the problem, the author draws conclusions from the Implementation of the Mayor's Instruction Number 01 of 2017 concerning Guidance and Mentoring of Climate Village Program Locations. That guidance and mentoring have not been optimal because community participation is still low. However, the sub-district as the mentor and mentor of the climate village program has attempted to encourage the community by going directly to the field to ensure active community participation.

Keywords: Implementation, Guidance and Mentoring, Climate Village Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Kampung Iklim adalah Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia, ditambah lagi Kerusakan lingkungan yang terjadi khususnya dalam lingkup pengelolaan sampah. Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendorong seluruh pihak dalam aksi nyata menghadapi perubahan iklim. Dengan cara melaksanakan program kegiatan misalnya, pembangunan pedesaan dengan emisi bahan perusak ozon yang rendah dan perluasan tutupan vegetasi, pengawasan dan pemanfaatan limbah/pemborosan, pengendalian infeksi terkait lingkungan, perluasan ketahanan pangan dan budidaya metropolitan, dan perluasan ketahanan energi seperti pemanfaatan energi baru dan ramah lingkungan. perlindungan energi. Program ini dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2010 yang dituangkan pertama kali dalam Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Proklam), diperbarui Peraturan Menteri LHK No.P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (roadmap proklam Kemen LHK, 2017).

Pemerintah Kota Palembang telah memiliki regulasi berupa instruksi Walikota Palembang Nomor 01 tahun 2017 tentang pembinaan dan pendampingan lokasi

program kampung iklim. Di dalam Instruksi Walikota tersebut telah menginstruksikan pembinaan dan pendampingan lokasi program kampung iklim sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan lokasi Program Kampung Iklim skala Rukun Warga/Kelurahan yang mewakili Kecamatan di Kota Palembang untuk diusulkan ke Tingkat Pusat/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
2. Mendukung dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan komponen utama Program Kampung Iklim meliputi mitigasi, adaptasi dan kelembagaan.
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi lokasi-lokasi program Kampung Iklim skala Rukun Warga/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Walikota ini dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:
 - a. Budidaya rendah emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan tutupan vegetasi;
 - b. Pengelolaan dan pengelolaan sampah/limbah;
 - c. Pengendalian penyakit terkait iklim;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan urban farming; dan
 - e. Peningkatan ketahanan energi serta penggunaan energi baru, terbarukan dan
4. konservasi energi.

Kelompok kerja yang berperan dalam pembinaan dan pendampingan lokasi program kampung iklim di Kota Palembang yaitu pemerintah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kota Palembang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Perikanan Kota Palembang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, Camat Se-Kota Palembang, dan Lurah Se-Kota Palembang) sebagai pendamping dan pembina dalam pelaksanaan program kampung iklim yang ada di Kota Palembang.

Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam pembinaan dan pendampingan dalam implementasi program kampung iklim yang ada di Kota Palembang, agar dapat mencapai hasil dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rangka 3 meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Kelurahan Talang Betutu Yang Mewakili Kecamatan Sukarami menerima penghargaan apresiasi pembinaan Program Kampung Iklim tingkat Sumatra Selatan Pada kegiatan Memperingatan Hari Lingkungan Hidup Se dunia ke-50 di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya.

Kendala dalam implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Talang Betutu timbul karena beberapa alasan, yaitu

partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya terhadap kegiatan

Kendala dalam implementasi program kampung iklim di Kelurahan Talang Betutu timbul karena beberapa indikasi masalah yaitu kegiatan pembinaan yang seharusnya dilakukan namun tidak diberikan, partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya seperti kegiatan gotong royong, dan perilaku membuang sampah pada tempatnya belum terealisasi.

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang program kampung iklim yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Implementasi Instruksi Wali Kota No. 17 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah: Bagaimanakah pelaksanaan Implementasi Instruksi Wali Kota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa saja kendala dalam Implementasi Instruksi Wali Kota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kota Palembang .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang Kebijakan Publik, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Publik dan Program Kampung Iklim (ProKlim).

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sarana evaluasi untuk perbaikan dimasa mendatang bagi Kecamatan Sukarami dalam Implementasi Program Kampung Iklim(ProKlim) agar dalam implementasi programnya sesuai dengan pedomannya yaitu Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No.P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016.

c. Bagi STIA Satya Negara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut bagi jurusan Ilmu Administrasi Publik terkhusus konsentrasi Kebijakan Publik.

implementasi langsung dalam bentuk program dan melalui perumusan kebijakan yang bersumber atau diturunkan dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

B. Teori Teori Implementasi George Edward III dalam Dwiyanto,(2009:31)

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi. Dalam pendekatan teoritis ini, terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: Komunikasi,Sumber, Tata Letak, dan Struktur birokrasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

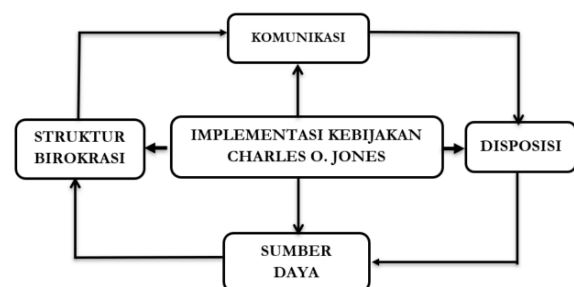
A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nugroho (2003:158), ada dua pilihan implementasi kebijakan, yaitu

Gambar 1

Model Teori Implementasi George Edward III dalam Dwiyanto,(2009:31)



Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga akan menimbulkan penafsiran yang berbeda pula. Agar implementasi menjadi efektif, mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut harus mengetahui apakah mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk

merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Pembahasan mengenai lembaga pelaksana suatu kebijakan tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, norma, dan pola hubungan berulang dalam lembaga eksekutif yang mempunyai hubungan potensial dan aktual /dengan apa yang mereka miliki dalam implementasi kebijakan. Van Horn dan Van Meter menyoroti sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan, yaitu: Keterampilan dan jumlah staf lembaga tersebut. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan dan proses unit dalam badan pimpinan. Sumber daya politik organisasi (misalnya dukungan dari anggota legislatif dan eksekutif). Vitalitas suatu organisasi. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas dan tingkat kebebasan berkomunikasi yang relatif tinggi dengan individu di luar organisasi. Hubungan formal dan informal suatu lembaga dengan lembaga pengambil keputusan atau pelaksana keputusan. Jika terdapat sumber daya yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan pihak yang melaksanakannya mengetahui apa yang perlu dilakukan, maka implementasi akan selalu gagal jika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama banyak orang, pemborosan sumber

daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentu saja akan berdampak pada individu dan, lebih umum lagi, pada sistem birokrasi.

Dalam hal ini penulis memilih menggunakan teori George Edwar III karena di pandang lebih tepat dan sesuai untuk mengukur keberhasilan Implementasi Instruksi Wali Kota No.01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim Di Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan menjadikan implementasi Bagian Keempat I No 1 instruksi Walikota No. 01 tahun 2017 tentang mengkoordinasikan ,menetapkan jadwal pembinaan dan pendampingan lokasi program kampung iklim sebagai fokus penelitian sehingga dapat mempermudah kegiatan peneliti dalam memecahkan permasalahan.

C. Instruksi Wali Kota No. 17 Tahun 2017 Standar dan sasaran Instruksi Wali Kota No. 17 Tahun 2017

Standar dan sasaran dalam pelaksanaan ProKlim di Kelurahan Talangbetutu berpedoman pada instruksi Wali Kota No. 01 Tahun 2017 Tentang pembinaan dan pendampingan lokasi Program Kampung Iklim di Kota Palembang. Dapat dikatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan ProKlim telah dipahami oleh Camat dan Lurah Talangbetutu sebagai salah satu kelurahan yang merealisasikan ProKlim di Kecamatan Sukarami, inti dari program ini yaitu tercantum di prihal keempat I No. 1 tentang mengkoordinasikan, menetapkan

jadwal pembinaan dan pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim.

Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kota Palembang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian, kebersihan dan kenyamanan tetap terjaga dalam rangka mewujudkan kampung yang asri di Kota Palembang khususnya pada kawasan Kecamatan Sukarami. Tetapi padakenyataannya, dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak semulus seperti yang direncanakan karena beberapa alasan, yaitu partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya terhadap kegiatan seperti halnya penanaman pohon dan gotong royong serta prilaku membuang sampah pada tempatnya belum terealisasi kepada seluruh masyarakat di buktikan dengan masih adanya sampah yang berserakan di lingkungan sedangkan telah di sediakan tempat sampah yang cukup.

Hal inilah yang akan cobah diteliti oleh peneliti, yakni praktek pada pelaksanaan Instruksi Walikota No.01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim .2.3 **Pembinaan Dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim**

D. Pengertian Pembinaan menurut beberapa ahli

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan,

peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan;
2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Poerwadarmita (dalam bukharistyle.blogspot.com :2012).Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

E. Pengertian Pendampingan Menurut Beberapa Ahli

Menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisor. Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk

memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Primahendra (2002:6) mengatakan pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisor.

Menurut Departemen Sosial, (2005,h.7) pendampingan adalah proses pembimbingan atau pemberian kesempatan pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.

Depsos RI (2007,h.4) juga menjelaskan bahwa pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan (fasilitas) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian korban secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui teknik pengumpulan data dan latar alami

dengan memanfaatkan peneliti lapangan sebagai instrumen kunci. Definisi ini menekankan bahwa studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan mampu menjelaskan variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2017, hlm. 7) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau menggambarkan beberapa fakta-fakta yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji

B. Definisi Operasional

Menurut Arikunto (2013) menyebutkan bahwa operasionalisasi adalah langkah untuk mengubah konsep penelitian menjadi konsep yang terukur melalui proses definisi operasional dan pemilihan indikator yang sesuai. Maka konsep operasional Implementasi Instruksi Walikota No.01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan lokasi program kampung iklim menggunakan model implementasi kebijakan dari Teori George Edward III dalam Dwiyanto (2009:31).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Instruksi Wali Kota Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Kelurahan Talang Betutu).

Peneliti mencari tambahan informasi dengan melakukan wawancara kepada masyarakat secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui Implementasi Instruksi Wali Kota Nomor 01 Tahun 2017 kepada masyarakat yang menjalankan Program Kampung Iklim di Kelurahan Talang Betutu.

B. Implementasi Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang (Studi Kasus Kelurahan Talang Betutu)

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyangkut enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, khususnya mengenai implementasi instruksi walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan lokasi program kampung iklim dengan

menggunakan teori Van Meter dan Van Horn antara lain sebagai berikut.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan di dalam sebuah kebijakan haruslah jelas dan terarah demi kesuksesannya suatu program yang akan di laksanakan. Sebuah implementasi dapat di katakan gagal apabila para pelaksana tidak mengetahui apa yang menjadi standar dan sasaran kebijakan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa standar dan sasaran kebijakan yang di lakukan oleh pihak kecamatan dalam Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang para pelaksana sudah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, berdasarkan sasaran yang akan dicapai dalam hal Ini dapat dilihat dari bagaimana para camat staf atau pegawai dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik sehingga kegiatan yang di laksanakan dapat mencapai tujuan.

Berdasarkan dengan teori yang ada bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang para petugas pelaksanaan kegiatan program kampung iklim telah melaksanakan tugasnya dengan struktur kebijakan yang baik serta didukung dengan infrastruktur yang baik seperti halnya pemanfaatan solar panel, pengelola minyak jelanta, dan pemilahan sampah

Menurut analisa penulis dalam melakukan program kampung iklim masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan program kampung iklim seperti halnya dalam pelaksanaan gotong royong dan peningkatan ekonomi kreatif.

2. Sumber Daya

Dalam menjalankan sebuah kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya, sumber daya tersebut dapat terdiri dari sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas suatu kebijakan tidak bisa berhasil apa bila sumber daya materialnya tidak dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menyatakan bahwa sumber daya manusia yang ada belum maksimal seperti halnya partisipasi masyarakat, sering mengalami kendala kekurangan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan program kampung iklim, seperti halnya dalam melaksanakan gotong royong yang didominasi para ibu-ibu yang mana banyak kegiatan yang membutuhkan tenaga seperti halnya menata ban bekas dan pembuatan rumah pohon.

Berdasarkan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber daya, dimana menurut van matter dan van horn sumber daya itu di bagi menjadi tiga, sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Dalam penelitian ini tiga sumber daya tersebut tentu ada, mulai dari sumber daya manusia seperti para pelaksana (Camat dan Parastaf Lainnya), dan sumber daya finansial pun ada seperti uang

kegiatan program kampung iklim yang membutuhkan biaya, dan yang terakhir sumber daya waktu, dalam kegiatan pelaksanaan program kampung iklim tentunya memiliki ketepatan waktu seperti menetapkan waktu pelaksanaan program kampung iklim.

3. Karakter Organisasi Pelaksana

Karakter organisasi pelaksana merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi kebijakan, dapat dilihat dari setiap kelompok sudah sejauh mana memberikan suatu dukungan bagi implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik para pelaksana yang ada di kecamatan sukarami kota Palembang dalam pendampingan dan pembinaan kegiatan program kampung iklim sudah berjalan baik, yang mana camat dan parastaf jajarannya memberikan dukungan secara langsung kepada masyarakat unruk berkontribusi dalam kegiatan program kampung iklim yang di laksanakan sudah sesuai dengan Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan, dukungan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat tidak membuat semua masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan program kampung iklim sehingga sering kali mengalami kekurangan sumber daya dalam kegiatan seperti halnya gotong royong yang memerlukan banyak tenaga dalam pelaksanaanya.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam

mejalankan suatu kebijakan dimana dalam menjalin sebuah komunikasi perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain agar tercapainya keberhasilan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan, komunikasi yang terjalin dalam proses pembinaan dan pendampingan kegiatan program kampung iklim yang di laksanakan camat di kecamatan sukarami kota Palembang sudah berjalan dengan baik yang mana dari pihak kecamatan dalam melakukan pendampingan terhadap kegiatan program kampung iklim kepada masyarakat sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik.

Dalam teori yang ada didalam penelitian ini, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan mempunyai standar dan tujuan yang harus dipahami oleh para implementor, dan komunikasi tersebut menjadi kerangka penyampaian suatu informasi kepada para pelaksanaan maka dari itu dalam program kampung iklim tersebut di harapkan setiap masing-masing para pelaksana, harus memahami agar tidak menyebabkan kurangnya komunikasi dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tepat dan benar.

Menurut analisa penulis dalam pembahasan diatas, bahwa komunikasi yang terjalin antar camat dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik hanya saja dari masyarakat masih dalam tahap pembinaan sehingga masih perlu banyak belajar agar kegiatan program kampung iklim terselenggara dengan baik

5. Sikap Para Pelaksana

Sikap implementator merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan di mana sikap para pelaksana menentukan suatu keberhasilan maupun kegagalan dari seluruh kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sikap para pelaksana kebijakan yang ada di kecamatan sukarami kota Palembang sudah dijalankan sesuai Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan, karna sikap ini merupakan faktor yang sangat penting agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif maka pelaksana harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dimana kualitas dari suatu kebijakan di pengaruhi oleh kualitas dan sikap dari para pelaksana.

Gambar 12
Kegiatan gotong royong



Sumber: Dokumentasi penulis

Menurut analisa penulis dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan

Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, dan juga efektif, dimana dapat dilihat dari sikap camat dan pegawai yang terlibat di kegiatan program kampung iklim secara langsung dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif dapat mendukung keberhasilan suatu impleentasi kebijakan, apabila lingkungan tersebut kondusif dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor kondisi ekonomi, sosial, dan politik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang dimana dalam pelaksanaan program kampung iklim baik sosial, ekonomi dan politi saling berhubungan dengan baik.

Menurut hasil analisa penulis kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan program kampung iklim dikarenakan setiap kegiatannya semua saling keterkaitan satu dengan yang lain, baik bidang sosial, ekonomi dan politik.

C. Pembinaan dan Pendampingan

Berdasarkan hasil penelitian berikut beberapa pembahasan sesuai

dengan peraturan Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang sebagai berikut:

1. Langkah-langkah mengkoordinasikan

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya memiliki langkah-langkah dalam mengkoordinasikan suatu kegiatan, salah satunya kegiatan program kampung iklim yang mana kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik apa bila sudah sesuai tahapan dalam pengerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis setiap tahapan-tahapan yang dilaksanakan sudah sesuai prosedur yang berlaku sehingga kegiatan program kampung iklim berjalan dengan baik, yang mana pada setiap kegiatannya baik para camat, pegawai serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan program kampung iklim dapat melaksanakan tugasnya dengan terarah seperti halnya pembagian tugas untuk pembuatan taman bacaan dan taman hijau sehingga tugas terbagi merata.

Menurut analisa penulis langkah-langkah dalam mengkoordinasikan kegiatan program kampung iklim di talang betutu sudah berjalan sebagai mana mestinya walaupun terkadang masih mengalami kendala karena kurangnya partisipasi masyarakat setempat.

2. Jadwal pelaksanaan Program Kampung Iklim

Kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dan terlaksana dengan

baik apabila semua tahapan sudah terjadwal dengan baik dan terarah, kegiatan program kampung iklim yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik apabila jadwal yang dibuat sudah sesuai dan menyesuaikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya kegiatan program kampung iklim yang ada sudah menyesuaikan dan sesuai kesepakatan bersama sehingga bisa berjalan dengan lancar dan terarah, namun walaupun sudah disesuaikan dalam penjadwalan kegiatan program kampung iklim masyarakat setempat masih ada yang tidak mengikuti kegiatan yang dibuat, karena banyak faktor salah satunya pekerjaan dan kepentingan pribadi masyarakat.

Menurut analisa penulis kegiatan program kampung iklim dari pendampingan dan pembinaan dalam penetapan jadwal sudah dilaksanakan dengan baik oleh, yang menjadi hambatan yaitu dari partisipasi dikarenakan kesibukan dan faktor pribadi lainnya.

3. Pendampingan dilakukan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam Program Kampung Iklim

Dalam kegiatan program kampung iklim untuk memastikan partisipasi masyarakat diperlukn adanya pendampingan serta pembinaan terhadap masyarakat sekitar untuk ikut, pembinaan dan pendampingan sangatlah berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan program kampung iklim guna mencapai tujuan bersama suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar jika masyarakatnya kurang

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pembinaan dan pendampingan dalam kegiatan program kampung iklim sudah di jalankan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, namun dari masyarakat setempat mengalami kendala seperti kurangnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan kegiatan program kampung iklim.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil simpulan yaitu:

pelaksanaan Instruksi Walikota No. 01 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim di Kecamatan Sukarami Kota Palembang telah berjalan sesuai standar dan sasaran kebijakan yang ditetapkan, didukung oleh karakter organisasi pelaksana yang baik dan komunikasi antar organisasi yang efektif. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih kurang optimal dalam kegiatan, dan terdapat kendala dalam sumber daya manusia serta partisipasi aktif masyarakat dan kendala lainnya dalam pembinaan dan pendampingan seperti halnya sosialisasi dan pelatihan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari program kampung iklim tersebut.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

Untuk meningkatkan efektivitas Program Kampung Iklim

di Kecamatan Sukarami, disarankan untuk memperkuat sosialisasi dan pelatihan masyarakat guna meningkatkan partisipasi aktif mereka, serta melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Selain itu, memperluas kolaborasi dengan organisasi lokal dan LSM untuk mendukung sumber daya manusia dan finansial sangat penting. Meningkatkan komunikasi antar organisasi melalui forum rutin akan membantu mengatasi hambatan, dan menyusun jadwal kegiatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. 1(1).Oktasari IInda Duana. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Negeri 1 Perembun*. Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta.
- Arifin Tahir, 2014 , *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Dunn,William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada PressMangunhardjana, Pembina Pan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta:Kanimus, 1986), hlm. 17.



- Mulyadi, Deddy. 2015: 45, 47. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Nihlatun, 2019. *Pengertian Implementasi JURNAL ARTICEL Angewandte Chemie International Edition*, 6(11)
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo **Primahendra.**
- R. 2002. Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Jakarta**
- Trecy Austin, Marleni Marleni, 2021. *IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM Jurnal Abdimas Indonesia* 1(3) 96-104
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.